

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PDT.G/2018/PN.TPG)**

Oleh: Nurhadi Pratama
NIM.190574201064

ABSTRAK

Dalam zaman globalisasi saat ini, korelasi antara manusia menjadi sangat vital, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mempererat hubungan sosial di antara individu. Korelasi antar manusia merupakan bentuk kerjasama yang dikenal sebagai engagement. Perikatan (verbinten) adalah sebuah hubungan hukum di antara dua pihak di mana satu pihak meminta atau melaksanakan suatu tindakan dari pihak lain, sementara pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Terdapat kesepakatan, selama ada kontrak. Perjanjian dari Pasal 1313 KUHPerdata merupakan “perjanjian berarti perbuatan seorang atau lebih dengan mengikat dirinya oleh seorang atau lebih”. Hukum kontrak memiliki salah satu asas aturan: asas kebebasan berkontrak. Ini berarti bahwa selama kontrak tidak dirancang secara hukum serta menggunakan itikad baik, siapa pun bebas untuk menghasilkan kontrak yang meliputi persyaratan asal segala bentuk kontrak. Tidak melanggar ketertiban umum dan martabat. Dari perspektif hukum, setiap pihak sudah memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dalam putusan nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tpg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sesuatu hal yang berbeda karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya karena Penggugat Wanprestasi namun tidak terima proses Lelang dan eksekusi yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dilihat dari hasil pertimbangan hukum dalam putusan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan lelang tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) yang “menyatakan secara hukum pelaksanaan Lelang tertanggal 28 Oktober 2016 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor.2095/Kel.Kijang, seluas 625 M2 atas nama Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum “. Disamping itu penulis juga menegaskan bahwa sesungguhnya penyelesaian sengketa wanprestasi atau utang piutang tidak perlu melalui langsung ke Pengadilan namun dapat dilakukan dengan adanya hak tanggungan untuk dapat langsung melelang di Balai Lelang Negara.

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Utang Piutang, Berkontrak

**RESOLUTION OF DISPUTES OF BREACH OF PERFORMANCE IN DEBT
AGREEMENTS
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 37/PDT.G/2018/PN.TPG)**

By
Nurhadi Pratama
NIM.190574201064

ABSTRACT

In today's era of globalization, the correlation between humans is very vital, especially in meeting the needs of life and strengthening social relations between individuals. Correlation between humans is a form of cooperation known as engagement. There is an agreement, as long as there is a contract. The agreement from Article 1313 of the Civil Code is "an agreement means an act of one or more by binding himself by one or more". Contract law has one of the basic rules: the principle of freedom of contract. This means that as long as the contract is legally designed and uses good faith, anyone is free to produce a contract that includes the original requirements of all forms of contracts. Does not violate public order and dignity. From a legal perspective, each party has obtained rights and obligations in accordance with the provisions of the agreement. The purpose of this study is to determine the analysis of the settlement of default disputes in debt agreements in decision number 37 / Pdt.G /2018 /PN.Tpg. The method used in this study is normative and empirical legal research. The results of this study state that default and unlawful acts are different things because the lawsuit filed by the Plaintiff is actually because the Plaintiff is in default but does not accept the Auction process and execution carried out by the Defendants can be seen from the results of legal considerations in the decision as follows "Considering, that because the implementation of the auction is valid and based on law, then against the petition of the lawsuit number 2 (two) which "legally states the implementation of the Auction dated October 28, 2016 against the land Certificate of Ownership Number. 2095 / Kel. Kijang, covering an area of 625 M2 in the name of the Plaintiff, which was carried out by Defendant II at the request of Defendant I as an Unlawful Act ".

Keywords: Unlawful Acts, Debt And Receivable Agreements, Contracts